

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI KELURAHAN
HELVETIA TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh:

**NAMA : INDAH WIDIA FITRI
NPM : 2005170207
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 4624567 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **INDAH WIDIA FITRI**
NPM : **2005170207**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**
Judul Skripsi : **ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR**

Dinyatakan : **(A-)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanuni, SE., M.Si)

(Hj. Hafsa, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.) (Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : INDAH WIDIA FITRI
N P M : 2005170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH WIDIA FITRI
N P M : 2005170207
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	perbaiki sistematika penulisan pembahasan lebih dikeper.	26/3/24	
Bab 5	kesimpulan diperbaiki secara pabriki	26/3/24	
Daftar Pustaka	sitasi dosen sdh	26/3/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Maret 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH WIDIA FITRI
N P M : 2005170207
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Perbaikan penulisan nomor pada di, duplikasi	1/4/24	2/1
Bab 5	kemungkinan sudah	1/4/24	2/1
Daftar Pustaka	Sifat dan data	1/4/24	2/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, Maret 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH WIDIA FITRI
N P M : 2005170207
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Revisi masalah harus lebih dielaborasi lagi	25/4/24	ZH
Bab 5	Saran lebih mendalam ya baju	25/4/24	ZH
Daftar Pustaka	Referensi dosen dan umum	25/4/24	ZH
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDAH WIDIA FITRI
N P M : 2005170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI , SE., M.Si., Ak., CA
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	<i>Saran di perbaiki</i>	<i>3/5/24</i>	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Ace Rasm ke sidang</i>	<i>6/5/24</i>	<i>[Signature]</i>

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari , SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Indah Widia Fitri

NPM : 2005170207

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Penelitian : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Helvetia Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024
Saya yang menyatakan



Indah Widia Fitri

ABSTRAK

Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Helvetia Timur

Indah Widia Fitri

Program Studi Akuntansi

Email : indahwidyafitri08@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data anggaran dan realisasi anggaran dari periode tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran yang dicapai oleh pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran meliputi kebijakan pengeluaran, kemampuan manajerial, serta keterbatasan sumber daya.

Kesimpulan hasil penelitian ini Tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran di Kelurahan Helvetia Timur tahun 2021-2022 cukup efektif dan cukup efisien, pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan hingga mencapai sangat efektif dan sangat efisien. Hasil rata rata memiliki tingkat efektivitas sebesar 74,67% yang berarti cukup efektif dan cukup efisien, yaitu belum maksimalnya pencapaian target anggaran. Karena belum menyelesaikan target program/proyek dalam ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir dan ketepatan perhitungan biaya.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Efektivitas , Efisiensi.

ABSTRACT

Analysis of Budget Realization to Assess the Effectiveness and Efficiency of Government Performance in East Helvetia District

Indah Widia Fitri

Accounting Study Program

Email: indahwidyafitri08@gmail.com

This research aims to analyze budget realization as a tool for assessing the effectiveness and efficiency of government performance. The method used is a descriptive analytical approach using budget data and budget realization from the 2021-2023 period. The research results show that there is a gap between the allocated budget and the budget realization achieved by the government. Factors that influence budget realization include expenditure policies, managerial abilities, and resource limitations.

The conclusion of this research is that the level of effectiveness and efficiency of budget realization in East Helvetia Subdistrict in 2021-2022 is quite effective and quite efficient, in 2023 it shows an increase until it reaches very effective and very efficient. The average results have an effectiveness level of 74.67%, which means that it is quite effective and quite efficient, namely that the budget target has not been achieved optimally. Because they have not completed the program/project targets in time, accuracy in making choices, accuracy in thinking and accuracy in cost calculations.

Keywords: Performance, Budget, Effectiveness, Efficiency.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur”**. Kemudian tidak lupa juga penulis ucapkan Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, semoga dengan seringnya kita bershalawat kepada beliau akan mendapatkan syafa'at dikemudian hari, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program Strata-1 (S1) dari program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, terutama Ayahanda Uwit Niti Sumitro dan Ibunda Nur Fuadi yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis berhasil menyusun proposal ini dengan semaksimalnya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari , SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan selama dibangku kuliah.
9. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh pegawai Kelurahan Helvetia Timur yang telah memberikan izin riset, data, informasi, dan bantuan selama riset kepada penulis.
11. Teman – teman penulis yang membantu, mencarikan tempat riset, memotivasi dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini Irda, Ade, Amalia, dan Ellen.

12. Teman – teman penulis yang selalu menjadi tempat curahan hati, support dan bantuan selama awal perkuliahan sampai detik ini Serly, Sri, Rani, Khairunnisa, Sari, Putri, dan Winda.
13. Seluruh teman – teman penulis dari kelas E Akuntansi Pagi, kelas C Akuntansi Malam, dan kelas A Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik Malam Stambuk 2020.
14. Abang penulis yang selalu penulis sayangi Joko Marwanto dan Febria Wanda yang sempat menyayangi penulis dan penulis berharap kembalilah jadi sosok abang yang selalu adeknya rindukan.
15. Terakhir untuk diri saya sendiri Indah Widia Fitri, Npm 2005170207, terima kasih telah bertahan di dunia ini walaupun terkadang hampir putus asa dan menyerah, terima kasih telah menemani proses pendewasaan ini, terima kasih selalu kuat menghadapi jahatnya dunia dan orang – orang di dalamnya, terima kasih mau melewati semuanya dengan susah dan payah, kamu harus sukses dan membahagiakan orang tuamu.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung untuk menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, 2024

Penulis,

Indah Widia Fitri
NPM 2005170207

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
A. Pengertian APBD	9
B. Fungsi APBD	9
2.1.2 Realisasi Anggaran.....	10
A. Pengertian Realisasi Anggaran.....	10
B. Tujuan Realisasi Anggaran.....	11
2.1.3 Kinerja	12
A. Pengertian Kinerja.....	12

B. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	14
2.1.4 Efektivitas dan Efisiensi.....	15
A. Pengertian Efektivitas	15
B. Pengertian Efisiensi	16
2.2 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Defenisi Operasional.....	24
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Deskripsi Data.....	29
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Helvetia Timur.....	29
4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Helvetia Timur	34
4.2 Analisis Data	35
4.2.1 Analisis Efektivitas	35
4.2.2 Analisis Efisiensi.....	37
4.2.3 Pembahasan.....	39
4.2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur.....	39
4.2.3.2 Efektivitas	39
4.2.3.3 Efisiensi.....	41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
5.3 Keterbatasan Penelitian	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran	5
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas	16
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi	17
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	25
Tabel 3.2 Kisi - Kisi Wawancara	26
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur T.A 2021-2023	34
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Kelurahan Helvetia Timur Menggunakan Rasio T.A 2021-2023.....	36
Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi Kelurahan Helvetia Timur Menggunakan Rasio T.A 2021-2023.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	31
Gambar 4.2 Grafik Efektivitas	39
Gambar 4.3 Grafik Efisiensi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan Akuntansi Sektor Publik dari tahun ke tahun pada Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, badan umum milik negara atau daerah, dan organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa sebelumnya. Sektor publik memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang dapat dijalankan oleh sektor swasta seperti menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik yaitu layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lainnya tetapi dalam tugas tertentu sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi sektor publik seperti fungsi birokrasi pemerintah. Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan pendapatan pajak lainnya, dimana kegiatannya sudah diatur dari peraturan yang berlaku (Rai, 2009).

Mardiasmo (2009:61), mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Kylvova (2014), Anggaran adalah suatu proses perencanaan kegiatan bisnis masa depan yang hasilnya didokumentasikan dengan sistem anggaran. Penganggaran berbasis kinerja menggunakan tujuan yang ditetapkan yang pelaksanaannya difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaannya, bukan pada kebutuhan dan keseimbangan. Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan

untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Osman Rusmana (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Pentingnya Realisasi Anggaran Kelurahan untuk mengetahui bagaimana anggaran kelurahan direncanakan, dialokasikan, dan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Mahmudi (2007) mengatakan efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai. Penting untuk menganalisis efektivitas

program dan proyek yang didanai oleh anggaran kelurahan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai.

Mardiasmo (2009:132) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. efisiensi memainkan peran yang sangat penting dalam menilai kinerja pemerintah di tingkat kelurahan. Penggunaan sumber daya yang efisien tidak hanya mengoptimalkan kinerja pemerintah, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik seperti optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok. Evaluasi Kinerja kinerja pemerintah di tingkat kelurahan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah efektif dan efisien digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kelurahan adalah unit pemerintahan yang terletak di tingkat paling bawah dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Anggaran kelurahan merupakan rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan belanja kelurahan untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran kelurahan sangat penting karena digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik di tingkat kelurahan. (Diah Syafitri, 2023).

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia penyebab kurangnya efektivitas dan efisiensi disebabkan kinerja pemerintah yang kurang perhatian, kurang transparansi dan kurang akuntabilitas terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan ke efektifan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan kinerja pemerintah sebagai pelaku administrasi dalam pengelolaan anggaran kelurahan yang tentunya harus bersikap transparansi dan akuntabilitas sehingga anggaran digunakan secara optimal dan partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran kelurahan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di kelurahan apabila terealisasikan dengan baik.

Pada tahun anggaran 2021 – 2023 Kelurahan Helvetia Timur memiliki laporan realisasi anggaran dana kelurahan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dengan keterangan belanja keseluruhan di Kelurahan Helvetia timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur
2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
2021	Belanja Keseluruhan	544.890.000	368.806.000	176.084.000	67,68%
2022	Belanja Keseluruhan	857.141.500	546.122.364	311.019.136	63,71%
2023	Belanja Keseluruhan	394.587.952	365.525.021	29.062.931	92,63%

(Sumber: Data Kelurahan Helvetia Timur)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya terealisasikan karena belum mencapai 100% yang menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2010 Pasal 16 yaitu perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat dari bagian anggaran 999,08 atau dipersenkan 99.908%. Hal ini terlihat pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja sebesar 67,68% , pada tahun 2022 realisasi anggaran belanja sebesar 63,71% dan pada tahun 2023 realisasi anggaran belanja sebesar 92,63%.

Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti karena berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran tahun 2021 sisa alokasi anggaran 32,32% dengan jumlah nominal Rp 176.084.000, tahun anggaran 2022 sisa alokasi anggaran 36,29% dengan jumlah nominal Rp 311.019.136, belum mencapai target maksimal dikarenakan instansi kinerjanya kurang efektif, kurangnya ketepatan menentukan pilihan, faktor teknologi, dan kurangnya faktor sumber daya sehingga memungkinkan penggunaan anggaran pada Kantor Lurah Helvetia Timur menurun, dan di tahun anggaran 2023 sisa alokasi anggaran 7,37% dengan

jumlah nominal Rp 29.062.931. walaupun ditahun 2023 sudah tinggi dan mencapai rasio efektivitas tapi ada perbedaan di anggaran dari tahun 2021 – 2023 dimana tahun 2023 paling sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun identifikasi masalahnya Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur masih belum sepenuhnya terealisasikan, yaitu:

1. Belum maksimalnya tingkat efektivitas program dan proyek yang didanai oleh anggaran Kelurahan Helvetia Timur belum mencapai tujuan atau target
2. Belum maksimalnya tingkat efisiensi dalam penggunaan dana anggaran di Kelurahan Helvetia Timur
3. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran di Kelurahan Helvetia Timur

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi dana anggaran pada Kelurahan Helvetia Timur dengan menggunakan rasio Efektivitas?
2. Bagaimana realisasi dana anggaran pada Kelurahan Helvetia Timur dengan menggunakan rasio Efisiensi?

3. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam realisasi pengelolaan anggaran dana Kelurahan Helvetia Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas Kelurahan Helvetia Timur dalam merealisasikan anggaran dana kelurahan
2. Untuk menganalisis efisiensi Kelurahan Helvetia Timur dalam merealisasikan anggaran dana kelurahan
3. Untuk menganalisis faktor apa yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam merealisasikan anggaran Kelurahan Helvetia Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan khususnya tentang mengenai anggaran dan realisasi sebagai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

A. Pengertian APBD

Sujarweni (2015) menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut (Permendagri, No. 77 Tahun 2020), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Anggaran Daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran dimasa-masa akan datang.

B. Fungsi APBD

beberapa fungsi APBD menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.2 Realisasi Anggaran

A. Pengertian Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Osman Rusmana (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

B. Tujuan Realisasi Anggaran

Berikut adalah beberapa tujuan khusus realisasi anggaran:

1. **Mencapai Keseimbangan Anggaran:** Tujuan utama realisasi anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. Dengan memastikan keseimbangan ini, pemerintah atau entitas sektor publik dapat menghindari defisit anggaran yang berlebihan.
2. **Memastikan Penggunaan Dana Sesuai Rencana:** Realisasi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan sesuai dengan alokasi dan prioritas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Ini mencakup memastikan bahwa belanja yang direncanakan benar-benar digunakan untuk tujuan yang diinginkan.
3. **Menilai Pencapaian Tujuan Pembangunan:** Anggaran sering kali mencantumkan tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah atau entitas sektor publik. Realisasi anggaran membantu menilai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai dan apakah alokasi dana mendukung pencapaian tersebut.
4. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Realisasi anggaran memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Data realisasi anggaran dapat digunakan untuk membuat keputusan perbaikan, penyesuaian anggaran, atau perubahan strategi keuangan yang diperlukan.

2.1.3 Kinerja

A. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah ukuran konkret atau parameter yang digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan atau hasil dari suatu kegiatan atau program. Indikator kinerja memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program telah berhasil atau tidak berhasil mencapai tujuannya.

Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi, masukan, keluaran dan hasil (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Beberapa alat dan metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja antara lain:

1. Key Performance Indicators (KPIs): KPIs adalah indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
2. Balanced Scorecard: Balanced Scorecard adalah kerangka kerja manajemen strategis yang menggunakan beberapa indikator kinerja, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan, untuk mengukur kinerja organisasi.
3. Benchmarking: Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja organisasi atau proses dengan organisasi atau proses terbaik dalam industri atau sektor yang sama.
4. Survei dan Feedback: Survei dan feedback dari karyawan, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya dapat digunakan untuk mengukur kepuasan, persepsi, atau harapan mereka terhadap kinerja organisasi atau individu.
5. Penilaian Kinerja Karyawan: Penilaian kinerja karyawan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja individu terhadap tujuan, standar, dan ekspektasi yang telah ditetapkan.
6. Analisis Rasio Keuangan: Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi dengan membandingkan berbagai rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi.

7. Peta Strategis: Peta Strategis adalah representasi visual dari tujuan strategis sebuah organisasi dan bagaimana setiap tujuan tersebut terkait satu sama lain. Ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara holistik.
8. Software Manajemen Kinerja: Ada banyak perangkat lunak yang tersedia yang dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam mengukur, melacak, dan menganalisis kinerja mereka, serta mengelola proses penilaian kinerja karyawan.

B. Manfaat Pengukuran Kinerja

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengukuran kinerja:

1. Penilaian Pencapaian Tujuan: Pengukuran kinerja memberikan dasar objektif untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi, departemen, atau individu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Identifikasi Permasalahan dan Peluang: Pengukuran kinerja membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan.
3. Penetapan Standar Kinerja: Pengukuran kinerja memungkinkan penetapan standar atau target kinerja yang realistis. Standar kinerja memberikan pedoman untuk menilai prestasi dan mengukur kesuksesan sesuai dengan harapan organisasi.
4. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi: Dengan mengetahui kinerja yang sebenarnya, organisasi dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

5. Evaluasi Kinerja Karyawan: Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja individu atau tim.
6. Peningkatan Akuntabilitas: Pengukuran kinerja meningkatkan tingkat akuntabilitas di dalam organisasi. Dengan memantau dan mengukur pencapaian tujuan, organisasi dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memegang tanggung jawab terhadap tugas dan tujuan mereka.
7. Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement): Data kinerja membantu organisasi untuk terus melakukan evaluasi, penyesuaian, dan inovasi agar dapat meningkatkan operasional dan hasil.

2.1.4 Efektivitas dan Efisiensi

A. Pengertian efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Mahmudi (2007) mengatakan efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai.

Indikator Kriteria efektivitas kinerja pemerintah menurut (makmur, 2011) sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Berdasarkan formula diatas untuk melihat kriteria efektivitas dan tidak efektivitas nilai kinerja anggaran menurut peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, maka bisa dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Persentase pengukuran	Kriteria Efektivitas
90% >	Sangat Efektif
80% - 90%	Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
50% - 60%	Kurang Efektif
< 50%	Tidak Efektif

Sumber: Peraturan menteri keuangan RI No 62 Tahun 2023

B. Pengertian Efisiensi

Efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan.

Mardiasmo (2009:132) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

Menurut rumus diatas untuk melihat efisiensi atau tidak efisiensi nilai kinerja anggaran menurut peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No 62 tahun 2023, maka bisa dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Persentase pengukuran	Kriteria Efisiensi
90% >	Sangat Efisien
80% - 90%	Efisien
60% - 80%	Cukup Efisien
50% - 60%	Kurang Efisien
< 50%	Tidak Efisien

Sumber: peraturan menteri keuangan RI No 62 Tahun 2023

Efisiensi kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang penting. Menurut (Bastian, 2006) berikut beberapa indikator penentu efisiensi kinerja pemerintah daerah:

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
2. Faktor struktur organisasi, susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor sumber daya manusia, seperti tenaga, kerja, kemampuan kerja, peralatan kerja, tempat bekerja dan dana keuangan.
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut dalam suatu usaha yang berdaya dan berhasil untuk mencapai sasaran.

3.2 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan tinjauan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung kerangka berpikir penelitian dilihat pada table 2.3

Tabel 2.3
Ringkasan hasil penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah dan Nur Handayani (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi pemerintah	Hasil penelitian efektivitas efektivitasnya pada tahun 2016-2018 efektif secara keseluruhan, hal ini terjadi karena tingkat tercapainya efektivitas yang lebih dari 90% dengan kata lain dianggap baik. Sebaliknya hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori

			kurang efisien, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja.
2.	Kiky Muryanti, Eko Sugianto (2017)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dikabupaten wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 100%. Sedangkan perkembangan tingkat efisiensi menunjukkan adanya penurunan mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah, meskipun demikian semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran.
3.	Muchriana Muchran, Endang Winarsih, Heldawati (2021)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan dikabupaten luwu selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitas rata-rata diatas 100%. Sedangkan tingkat

			perkembangan efisiensi dikatakan juga cukup efisien.
4.	Astria Nurjannah Dien, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw (2015)	Analisis laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Bitung	Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif. Namun tingkat kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.
5.	Siti Mardhiyah Ulfa (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 masih dikatakan cukup efisien.

2.2 Kerangka Berpikir

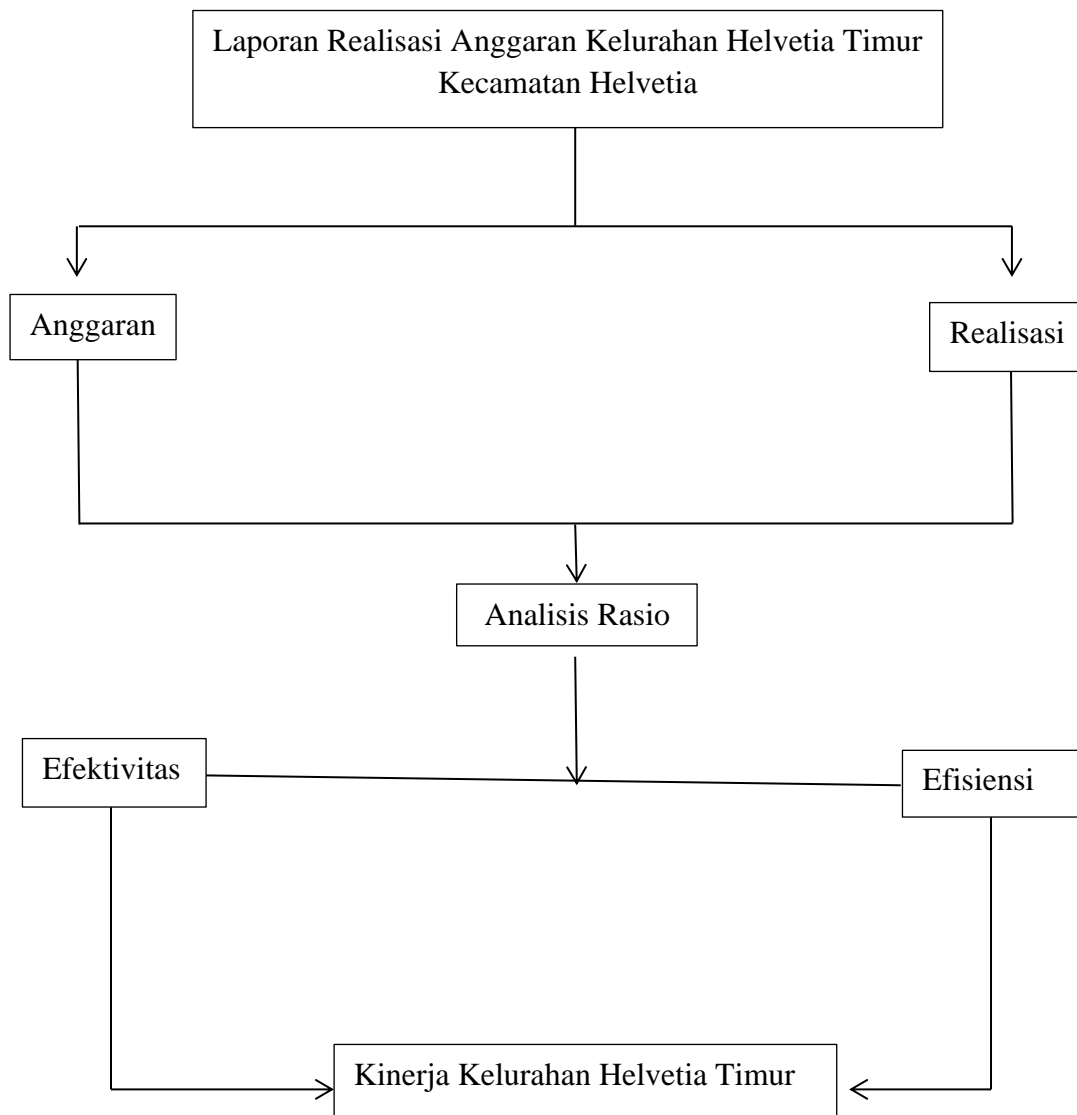
Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan anggaran dan realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja. Menurut (Permendagri No.6 Tahun 2008) menjelaskan bahwa pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelurahan adalah unit pemerintahan yang terletak di tingkat paling bawah dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Anggaran kelurahan merupakan rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan belanja kelurahan untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Kylvova (2014) Anggaran adalah suatu proses perencanaan kegiatan bisnis masa depan yang hasilnya didokumentasikan dengan sistem anggaran. Penganggaran berbasis kinerja menggunakan tujuan yang ditetapkan yang pelaksanaannya difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaannya, bukan pada kebutuhan dan keseimbangan. Osman Rusmana (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dari anggaran dan realisasi diturunkan Analisis Rasio yaitu proses evaluasi yang memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan dan kinerja operasional perusahaan dalam berbagai aspek. Rasio Efektivitas adalah Rasio efektivitas mengukur sejauh mana sebuah organisasi atau proses berhasil mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. memiliki 5 indikator ketetapan dalam mengukur efektivitas yaitu ketetapan waktu, ketetapan perhitungan biaya, ketetapan dalam pengukuran, ketetapan dalam menentukan pilihan, dan ketetapan berpikir (Makmur, 2011). Rasio Efisiensi adalah di sisi lain, mengukur seberapa baik sebuah organisasi atau proses menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Memiliki 5 faktor indikator dalam mengukur efisiensi yaitu faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, faktor struktur organisasi, faktor SDM, faktor dukungan kepada aparatur, dan faktor pimpinan (Bastian,2006).

Dari materi di atas dapat disimpulkan bagaimana analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi di Kelurahan Helvetia Timur. Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik deskriptif. pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian dilandaskan filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada subjek atau objek tertentu (Sugiono, 2010). Sedangkan penelitian kuantitatif menghitung perkembangan efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran kelurahan Helvetia Timur periode 2021-2023. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Independent Variable sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi kinerja. Dependent Variable sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019).

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai.
2. Efisiensi ialah sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Helvetia Timur, Jl. Setia Budi No.01, Helvetia Tim., Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20117

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang mulai dari Desember 2023 – Mei 2024

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Bimbingan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
5.	Penyusunan Skripsi						
6.	Bimbingan Skripsi						
7.	Bimbingan Skripsi						
8.	Sidang Meja Hijau						

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini baik melalui sumber primer maupun sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Penelitian Lapangan (Field Research)

Adapun pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan adalah:

1. Wawancara, wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan pemimpin organisasi dan beberapa staf yang langsung menangani masalah laporan realisasi anggaran dana kelurahan.
2. Pengambilan data, data primer yang diperoleh secara langsung dari Kelurahan Helvetia Timur, dan data sekunder dalam hal ini yaitu data primer yang didapatkan dari observasi dan dokumentasi secara langsung di Kelurahan Helvetia Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan.

Tabel 3.2
Kisi – Kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator
1.	Efektivitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dalam pengelolaan dana kelurahan 2. Ketepatan perhitungan biaya dalam pengelolaan anggaran dana kelurahan 3. Ketepatan dalam pengukuran dana kelurahan 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan kegiatan dalam pengelolaan dana kelurahan 5. Ketepatan berpikir dalam pengelolaan dana kelurahan
2.	Efisiensi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan kelurahan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Faktor struktur organisasi dalam susunan yang stabil dari jabatan – jabatan baik structural maupun fungsional kelurahan 3. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat dalam berkegiatan 4. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, tempat bekerja dan dana anggaran kelurahan 5. Faktor pimpinan dalam kemampuan untuk mengkombinasikan kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil untuk mencapai sasaran kelurahan.
--	--	--

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2019).

Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran di kantor Kelurahan Helvetia Timur maka dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja.
2. Analisis efisien belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang

dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).

Langkah Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Meminta izin melakukan riset penelitian di Kelurahan Helvetia Timur.
2. Mengumpulkan data realisasi anggaran dana kelurahan periode 2021-2023.
3. Menganalisa anggaran dan realisasi pada data dana kelurahan periode 2021- 2023
4. Melakukan wawancara yang berhubungan dengan indikator efektivitas dan efesiensi kinerja.
5. Menganalisa penyebab terjadinya penurunan realisasi anggaran dan menganalisa efektivitas dan efesiensi dari data dana kelurahan.
6. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Penulis menjelaskan seluruh hasil dari penelitian yang ditemukan melalui wawancara dan pengambilan data langsung. Objek penelitian ini adalah Kelurahan Helvetia Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi anggaran sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran di Kelurahan Helvetia Timur tahun 2021-2023 dan struktur organisasi pada Kelurahan Helvetia Timur. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama sekretaris Kelurahan Helvetia Timur, pengolah data informasi dan administrasi perkantoran.

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Helvetia Timur

Kantor Kelurahan Helvetia Timur, Jl. Setia Budi No.01, Helvetia Tim., Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20117. Luas wilayah 1,82 km² yang terbagi menjadi 13 lingkungan, dengan jumlah penduduk 25.619 jiwa orang, jumlah KK 5.620.

Sebelum menjadi kecamatan defenitif terlebih dahulu melalui proses Perwakilan Kecamatan. Sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 138/402/K/1991 tanggal 05 februari 1991 dan Keputusan Walikota Medan Nomor. 138/595/SK/1991 tanggal 20 Maret 1991 dirubah namanya menjadi Perwakilan Kecamatan Medan Helvetia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 1991 di defenitifkan menjadi Kecamatan Medan

Helvetia yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1991 yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Helvetia
- b. Helvetia Tengah
- c. Helvetia Timur
- d. Dwi Kora
- e. Cinta Damai
- f. Tanjung Gusta
- g. Sei Kambing C-II

Kelurahan Helvetia Timur berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kelurahan Sei Agul
- Sebelah Selatan : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kelurahan Karang Berombak
- Sebelah Timur : Kecamatan Helvetia Tengah

a. Visi dan Misi Kelurahan Helvetia Timur

Adapun visi dan misi dari Kelurahan Helvetia Timur adalah sebagai berikut:

Visi:

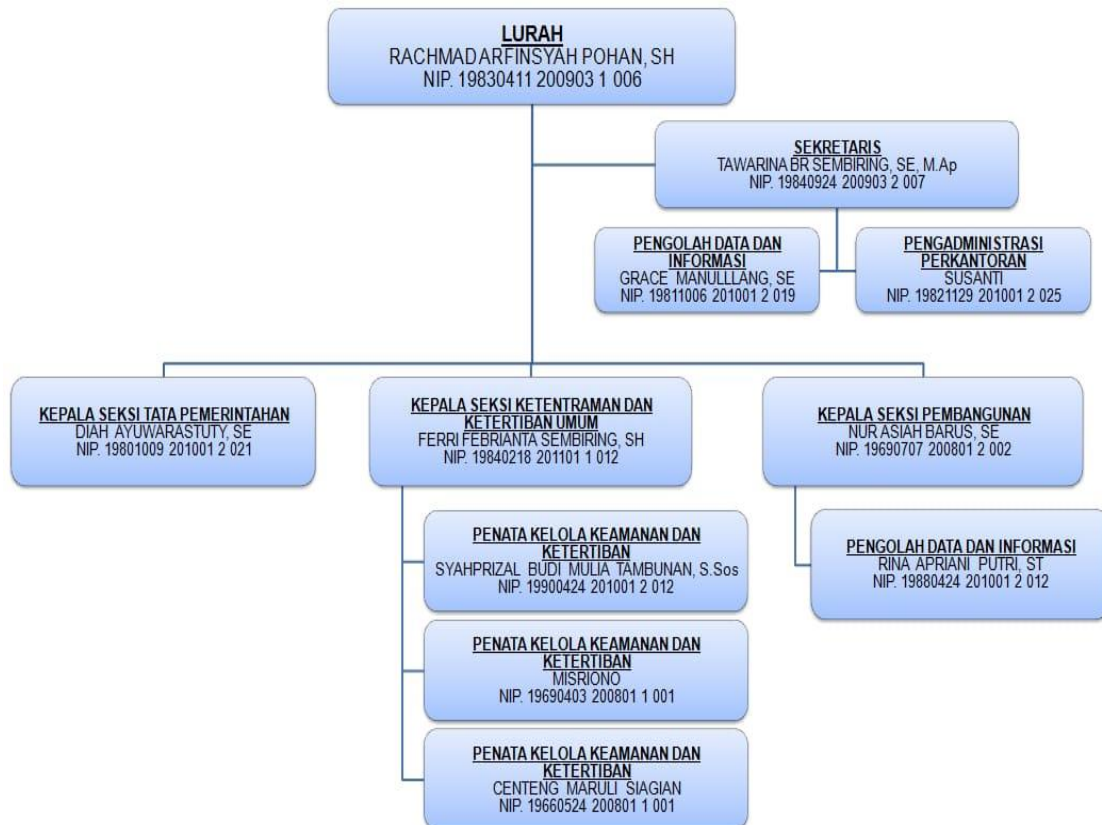
Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif

Misi:

- 1) Medan Berkah
- 2) Medan Maju
- 3) Medan Bersih
- 4) Medan Membangun

- 5) Medan Kondusif
- 6) Medan Inovatif
- 7) Medan Beridentitas

b. Struktur Organisasi Kelurahan Helvetia Timur



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun fungsi jabatan struktur organisasi Kelurahan Helvetia Timur adalah sebagai berikut:

1. Lurah
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
2. Sekretaris
 - a. Melaksanakan tugas kesekretarian kelurahan
 - b. Memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional ke unit organisasi kelurahan
 - c. Merencanakan program kerja badan
 - d. Perlindungan masyarakat, mengawasi dan membimbing
3. Pengolah Data dan Informasi
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana
 - b. Program pengelolaan data, informasi, dan penyajian data
 - c. Penyiapan analisis hasil pengawasan
 - d. Penyelenggara administrasi berbasis data
4. Pengadministrasi Perkantoran
 - a. Perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan
 - b. Distribusi barang serta logistik dalam kelurahan
 - c. Mengarsip dan merekap data yang masuk

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - b. Menyusun rancangan regulasi kelurahan
 - c. Pembinaan masalah pertahanan
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dibidang penegakan hokum
 - b. Menyiapkan surat konsep keputusan pemerintah
 - c. Menyusun rencana dan kegiatan program ketentraman dan ketertiban umum
7. Kepala Seksi Pembangunan
 - a. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pembangunan
 - b. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan
 - d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi
8. Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban
 - a. Mempelajari data ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Mengendalikan data ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Menyajikan hasil pengelolaan data ketentraman dan ketertiban umum

4.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur

Sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Kelurahan Helvetia Timur untuk periode tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur T.A 2021-2023

Belanja/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021		
Pembangunan Sarana dan Prasarana	336.890.000	189.107.000
Pemberdayaan Masyarakat	208.000.000	179.699.000
Jumlah	544.890.000	368.806.000
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022		
Pembangunan Sarana dan Prasarana	602.934.000	310.084.314
Pemberdayaan Masyarakat	254.207.500	236.038.050
Jumlah	857.141.500	546.122.364
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023		
Pembangunan Sarana dan Prasarana	78.340.157	65.972.938
Pemberdayaan Masyarakat	216.434.814	204.243.381
Operasional	99.812.981	95.308.702
Jumlah	394.587.952	365.525.021

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan Helvetia Timur

Dari tabel 4.1 menunjukkan hasil jumlah anggaran belanja keseluruhan tahun 2021-2023. Dimana belanja tertinggi di tahun 2021 tercatat pada pembangunan sarana dan prasarana yaitu sebesar Rp 189.107.000 dan angka anggarannya sebesar Rp 336.890.000 dengan selisih sebesar Rp 147.783.000.

Tahun 2022 belanja tertinggi tercatat pada pembangunan sarana dan prasarana yaitu sebesar Rp 310.084.314 dan anggarannya sebesar Rp 602.934.000 dengan selisih sebesar Rp 292.849.686.

Tahun 2023 belanja tertinggi tercatat pada pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp 204.243.381 dan anggarannya sebesar Rp 216.434.814 dengan selisih sebesar Rp 12.191.433.

4.2 Analisis Data

Dalam bab ini, diuraikan hasil analisis data yang bertujuan untuk mengemukakan temuan atau hasil penelitian yang relevan yaitu “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kelurahan Helvetia Timur” Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Proses analisis data melibatkan pengolahan seluruh data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan rumus yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Melalui langkah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta implikasi yang dapat diambil untuk pengembangan teori maupun praktik di bidang terkait.

4.2.1 Analisis Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

TAHUN 2021

$$\text{Belanja tahun 2021} = \frac{368.806.000}{544.890.000} \times 100 = 67,68\%$$

TAHUN 2022

$$\text{Belanja tahun 2022} = \frac{546.122.364}{857.141.500} \times 100 = 63,71\%$$

TAHUN 2023

$$\text{Belanja tahun 2023} = \frac{365.525.021}{394.587.952} \times 100 = 92,63\%$$

Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Kelurahan Helvetia Timur Menggunakan Rasio
T.A 2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan rasio
2021	Belanja keseluruhan	544.890.000	368.806.000	67,68%	Cukup Efektif
2022	Belanja keseluruhan	857.141.500	546.122.364	63,71%	Cukup Efektif
2023	Belanja keseluruhan	394.587.952	365.525.021	92,63%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kelurahan Helvetia Timur terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio efektivitas diukur dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021- 2023, dimana:

1. Untuk tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 67,68%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
2. Untuk tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 63,71%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.

3. Untuk tahun 2023 rasio efektivitas sebesar 92,63% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada antara diatas 90%

Dapat dikatakan, rasio paling rendah berada pada tahun 2021-2022, yang paling rendah adalah tahun 2022 dan yaitu sebesar 63,71% yang menunjukkan Kelurahan Helvetia Timur kurang efektif dikarenakan kekurangan sumber daya yang cukup. Sesuai dengan realisasi dana Kelurahan Helvetia Timur, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran tahun 2021-2022 cukup efektif, dalam artian belum maksimal dalam mengelola daerahnya.

4.2.2 Analisis Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well).

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

TAHUN 2021

$$\text{Belanja tahun 2021} = \frac{368.806.000}{544.890.000} \times 100 = 67,68\%$$

TAHUN 2022

$$\text{Belanja tahun 2022} = \frac{546.122.364}{857.141.500} \times 100 = 63,71\%$$

TAHUN 2023

$$\text{Belanja tahun 2023} = \frac{365.525.021}{394.587.952} \times 100 = 92,63\%$$

Tabel 4.3
Tingkat Efisiensi Kelurahan Helvetia Timur Menggunakan Rasio
T.A 2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan rasio
2021	Belanja keseluruhan	544.890.000	368.806.000	67,68%	Cukup Efisien
2022	Belanja keseluruhan	857.141.500	546.122.364	63,71%	Cukup Efisien
2023	Belanja keseluruhan	394.587.952	365.525.021	92,63%	Sangat Efisien

Sumber: data diolah oleh penulis

Dilihat dari tabel 4.3 maka untuk rasio efisiensi Kelurahan Helvetia Timur yang diukur dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023, dimana:

1. Untuk tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 67,68%, yang termasuk dalam kategori cukup efisien karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
2. Untuk tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 63,71%, yang termasuk dalam kategori cukup efisien karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
3. Untuk tahun 2023 rasio efisiensi sebesar 92,63%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada antara diatas 90%.

Dapat dikatakan rasio efisiensi paling rendah berada pada tahun 2023 yaitu sebesar 92,63% menunjukkan bahwa kurang efisien karena adanya pemborosan anggaran yang dikeluarkan.

4.2.3 Pembahasan

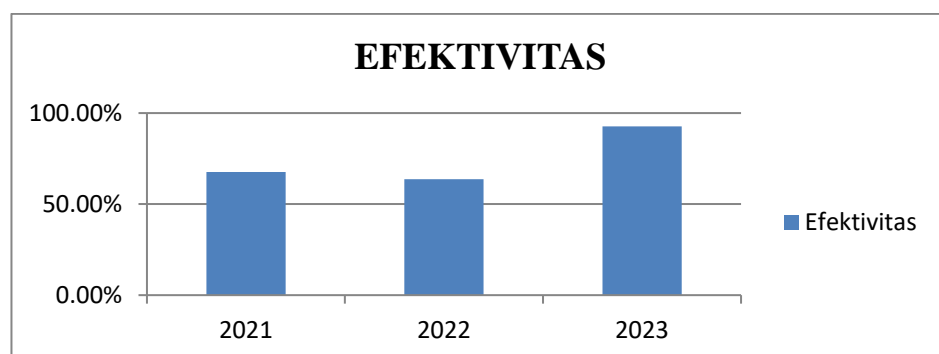
4.2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Helvetia Timur

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur”. Melalui data diatas dilihat dari hasil rata-rata tahun anggaran 2021-2023 sebesar 74,67% menurut kriteria analisis rasio dikatakan cukup efektif dan cukup efisien.

4.2.3.2 Efektivitas

Dari hasil analisis efektivitas kinerja pemerintah Kelurahan Helvetia Timur dari tahun 2021-2023 hasil rata rata memiliki tingkat efektivitas sebesar 74,67% yang berarti cukup efektif, yaitu belum mencapai target anggaran. Tahun 2021-2022 rasio efektivitas masih diatas 60% dan pada tahun 2023 rasio efektivitas mengalami kenaikan diatas 90% .

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Tahun 2021-2023



Gambar 4.2 grafik efektivitas

Berdasarkan gambar grafik efektivitas 4.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio efektivitas.

1. Rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2021 memulainya pada tingkat 67,68% yang menyebabkan rasio efektivitas berada pada cukup efektif dikarenakan ketepatan waktu dalam mencari perencanaan atau program masih sangat kurang.
2. Rasio efektivitas untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,97% yang menyebabkan rasio masih cukup efektif dikarenakan faktor perhitungan biaya dan dalam menentukan pilihan masih kurang dalam program atau proyek yang dilakukan.
3. Rasio efektivitas tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 28,92% menyebabkan rasio efektivitas menjadi sangat efektif dikarenakan ketepatan waktu, perhitungan biaya dan menentukan pilihan dalam program atau proyek untuk masyarakat sudah dikatakan tepat sasaran.

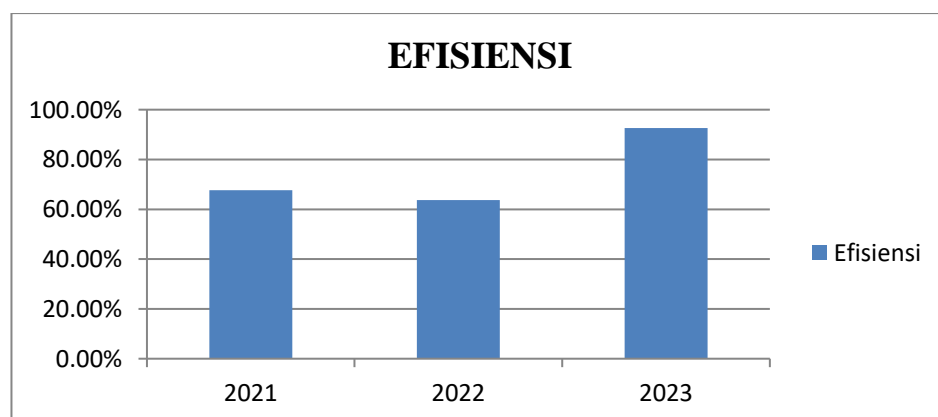
Hasil hitungan rata – rata dari tahun 2021- 2023 adalah sebesar 74,67% yang berarti hasil hitungan rata –rata dari tahun 2021-2023 adalah cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara kurangnya efektivitas di Kelurahan Helvetia Timur menurut sekretaris Kelurahan Helvetia Timur ibu Tawarina Sembiring SE.,M.Ap *“beberapa faktornya antara lain sisa anggaran sebelumnya diambil dialihkan ke dinas yang lain seperti ke dinas kesehatan, pembangunan TK, memberikan bantuan ke masyarakat yang berdampak covid-19 pada tahun sebelumnya dan masih banyak melakukan pekerjaan dari rumah, jadi kurangnya koordinasi antar bagian, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi”*. Selanjutnya hasil wawancara pengolah data dan

informasi Kelurahan Helvetia Timur ibu Grace Manullang SE “ketidakmampuan dalam pengumpulan data secara tepat waktu karena pekerjaan masih menggunakan shif pada tahun sebelumnya, dan dana kelurahan dialihkan ke pemberdayaan kantor, kurangnya integrasi informasi, dan keterbatasan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik”. Selanjutnya hasil wawancara pengadministrasi perkantoran Kelurahan Helvetia Timur ibu Susanti “kurangnya koordinasi antar unit dalam pengumpulan dan penyusunan data, kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap prosedur administrasi yang tepat, serta terbatasnya waktu dan sumber daya”.

4.2.3.3 Efisiensi

Dari hasil analisis efisiensi kinerja pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur memperoleh hasil rata – rata yaitu 74,67% yang memiliki tingkat cukup efisien. Pada tahun 2021-2022 tingkat rasio efisiensi dalam kategori cukup efisien dan pada tahun 2023 tingkat rasio efisiensi mengalami kenaikan sehingga menjadi kategori sangat efisien.

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Tahun 2021-2023



Gambar 4.3 Grafik Efisiensi

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan kenaikan dan penurunan pada rasio efisiensi.

1. Rasio efisiensi untuk tahun anggaran 2021 memulainya pada tingkat 67,68% yang menyebabkan rasio efisiensi berada pada tingkat cukup efisien dikarenakan sumber daya digunakan agar lebih maksimal.
2. Rasio efisiensi untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,97% yang menyebabkan rasio masih cukup efisien dikarenakan faktor pengawasan dari pimpinan dan keterlibatan masyarakat.
3. Rasio efisiensi tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 28,92% menyebabkan rasio cukup efisien menjadi sangat efisien dikarenakan sumber daya sudah maksimal.

Hasil hitungan rata – rata dari tahun 2021- 2023 adalah sebesar 74,67% yang berarti hasil hitungan rata –rata dari tahun 2021-2023 dikatakan cukup efisien.

Berdasarkan hasil wawancara tentang penurunan efisiensi di Kelurahan Helvetia Timur menurut sekretaris ibu Tawarina Sembiring SE.,M.Ap *“perubahan kebijakan yang mendadak dan kurangnya teknologi dalam pengelolaan data”*. Selanjutnya hasil wawancara menurut pengolah data dan informasi Kelurahan Helvetia Timur ibu Grace Manullang SE *“keterbatasan sumber daya manusia yang memperlambat proses pengolahan data, gangguan teknis, dan perubahan kebijakan atau regulasi dari atasan”*. Selanjutnya hasil wawancara menurut pengadministrasi perkantoran Kelurahan Helvetia Timur ibu Susanti

“perubahan kebijakan mendadak, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur administrasi”.

Hasil data presentase pada tabel 4.2 dan 4.3 yang mendapatkan rata-rata dari tahun 2021-2023 yaitu 74,67%. Sehingga hasil program atau proyek yang di danai oleh anggaran Kelurahan Helvetia Timur dikatakan kurang efektif dan dikatakan efisien. Kemudian faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi adalah:

- a. Faktor sumber daya, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, daya kerja, peralatan kerja dan dana.
- b. Faktor teknologi dan komunikasi.
- c. Kepemimpinan dan keterlibatan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya, efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja, dan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.
2. Tingkat efektivitas realisasi anggaran di Kelurahan Helvetia Timur tahun 2021-2022 cukup efektif dan tahun 2023 sangat efektif. Hasil rata rata tahun 2021-2023 memiliki tingkat efektivitas sebesar 74,67% yang berarti cukup efektif, yaitu belum maksimalnya pencapaian target anggaran. Karena belum menyelesaikan target program/proyek dalam ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir dan ketepatan perhitungan biaya.
3. Tingkat efisiensi realisasi anggaran di Kelurahan Helvetia Timur tahun 2021-2022 tingkat rasio efisiensi cukup baik dan pada tahun 2023 tingkat rasio efisiensi sangat baik. Hasil rata-rata tahun 2021-2023 sebesar 74,67% ialah cukup efisien.
4. Faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam pengelolaan realisasi anggaran dana Kelurahan Helvetia Timur

adalah kurangnya faktor sumber daya, faktor dukungan dari pemimpin dan masyarakat, faktor teknologi.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas di Kelurahan Helvetia Timur harus lebih meningkatkan koordinasi antar bagian, memperbanyak sumber daya manusia, mengumpulkan data secara tepat waktu, dan mengoptimalkan informasi untuk pengambilan keputusan suatu program/proyek lebih baik.
2. Untuk meningkatkan efisiensi di Kelurahan Helvetia Timur harus ditingkatkannya teknologi dalam pengelolaan data, memperbanyak sumber daya manusia supaya mempercepat kinerja pemerintah, dan meningkatkan pengetahuan tentang prosedur administrasi di kelurahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan untuk meneliti hal yang sama atau meneliti proses jalannya program/proyek yang dilakukan pemerintah daerah dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam proses penelitian ini, keterbatasan penelitian ini adalah dalam proses mendapatkan informasi pengetahuan dan data yang penting pihak kinerja pemerintah kurang mengetahui informasi yang penulis butuhkan dikarenakan pada tahun 2023 banyak pergantian perangkat pemerintah dikelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Kholila Siregar, S. (n.d.). *Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan*.
- Astuty, W. (2012). Pengaruh Lingkungan Bisnis Terhadap Informasi Akuntansi Manajemen Dan Penganggaran Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan. *Trikonomika*, 11(2), 160–175.
- Irafah, S., & Nurmala Sari, E. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Kareima Waney, C., P.E Saerang, D., & W. Alexander, S. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 334–341.
- Klychova, G. S., Faskhutdinova, M. S., & Sadrieva, E. R. (2014). Budget Efficiency for Cost Control Purposes in Management Accounting System. *Mediterranean Journal of Social Sciences*.
- Lantu, C., Lambey, L., & Wangkar, A. (1260). Analisis Efektifitas dan Efisiensi.... *Jurnal EMBA*, 5(2), 1260–1270.
- Lesmana, S., & Gunawan, A. (2007). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Yang Dipersepsikan Dan Strategi Kompetitif Terhadap Hubungan Sistem Kontrol Akuntansi Dengan Kinerja Perusahaan Perbankan Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2).
- Lubis, A. W., & Si, M. (2018). *Audit Kinerja Sektor Publik*.
- Mnimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Muryanti, K. (2017). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*.
- Nurmala Sari, E. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25–54.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Purnama Sari, D., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Bisman*, 10.

Purnamawati Saragih, D., & Firza Alpi, M. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiiitas Sebagai Intervening. *Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1).

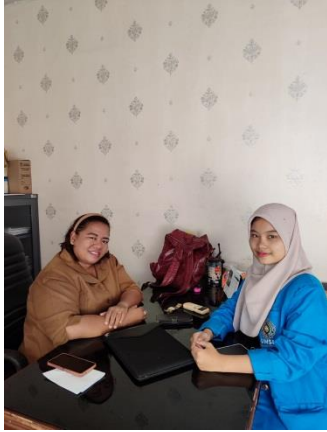
Ria Purwanti, S. (2018). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2017*.

Sumenge Sharon, A. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. In *74 Jurnal EMBA* (Vol. 1, Issue 3).

Ubar Harahap, R. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1).

LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi



2. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2010



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2010 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
 - d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 22/DPD/III/2009-2010 tanggal 19 April 2010;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. [Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18, angka 30, angka 35, angka 39, angka 41, dan angka 42 diubah, di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a, angka 27b, dan angka 27c, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, di antara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34a, di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 35a dan 35b, di antara angka 41 dan angka 42 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 41a, dan angka 31 dan angka 36 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdata internasional.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. pergeseran anggaran belanja:
 1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L);
 2. antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
 3. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/atau
 4. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - c. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan
 - d. perubahan pinjaman luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri (*drop loan*);
- ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi yang bukan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
- (4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaporkan Pemerintah kepada DPR RI dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) butir a.3) hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru (*new initiative*), kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 16B

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

Pasal 16C

- (1) Rincian alokasi belanja K/L diselesaikan oleh seluruh Komisi DPR hingga batas waktu tanggal 15 Mei 2010.
 - (2) Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan oleh Komisi terkait, maka Badan Anggaran berhak untuk menyelesaikannya dalam waktu satu minggu setelah batas waktu tersebut.
 - (3) Seluruh rincian transfer ke daerah dan dana pendidikan ke daerah ditetapkan oleh Badan Anggaran selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2010.
14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 17

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian;
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp30.249.613.680.000,00 (tiga puluh triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp89.618.446.100.000,00 (delapan puluh sembilan triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sebagian kurang bayar dana bagi hasil SDA minyak dan gas bumi serta kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan SDA kehutanan.

3. Peraturan Menteri dalam Negeri RI No.77 Tahun 2020

SALINAN	
 <p>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengingat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 2 -	
	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
Menetapkan:	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.</p>

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Menetapkan: MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3 -

- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

- a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

- 27 -

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2. APBD mempunyai fungsi:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
 - a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 28 -

- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan

- i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

- 97 -

- 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
 - 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 - 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
 - 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
 - 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan
 - 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau

- 98 -

- diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
 - n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

4. Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

2 61.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
5 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

6 62.Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
8 Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 9 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
11 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
12 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
13 kembali oleh pemerintah.
- 14 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 18 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
20 dan dana bagi hasil.
- 21 (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
26 memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain
27 dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan
28 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
29 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
30 pemerintah.

31 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

32 63.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
33 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
34 dengan tahun sebelumnya.

35 **NERACA**

36 64.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
37 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38 65.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan
39 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 62 Tahun 2023



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (7), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 34, Pasal 38, Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (9), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (6), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, monitoring dan evaluasi anggaran, serta tata cara pemberian penghargaan dan/atau sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

www.jdih.ke

10/53



- 10 -

- a. capaian *output*;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. efisiensi; dan
 - d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan
 - b. capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
 - (4) Capaian *Output* Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator *Output* Program dengan target Indikator *Output* Program.
 - (5) Capaian RO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
 - (6) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
 - (7) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. efisiensi *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan
 - b. efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
 - (8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
 - (9) Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian *Output* Program

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 11 -

Paragraf 4
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

Pasal 249

- (1) Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
- penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
 - penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar, dan/atau
 - penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja anggaran yang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran atas *outcome* dan Keluaran yang bersifat strategis dan prioritas.
- (3) Hasil evaluasi kinerja anggaran yang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tinjau ulang angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran atas keluaran yang sifatnya berulang.
- (4) Hasil evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menentukan kelayakan anggaran atas Keluaran.
- (5) Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran perencanaan anggaran sebagaimana

jdih.kemenkeu.go.id

- 180 -

- dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a untuk Kementerian/Lembaga dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf a menghasilkan nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.
- (6) Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a untuk BUN menghasilkan nilai kinerja anggaran BUN.
- (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
 - 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
- (8) Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
- nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
 - nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;
 - nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;
 - nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan
 - nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.
- (9) Nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk belanja Kementerian/Lembaga selain sebagai dasar penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan dasar pelaksanaan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 250

Data dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran diperoleh melalui sistem monitoring yang dikelola Kementerian Keuangan.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN
SANKSI KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 251

- (1) Untuk meningkatkan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga, kepada Kementerian/Lembaga dapat diberikan penghargaan dan/atau dikenai sanksi.

**LAPORAN
PENGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAHUNAN BARAN DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN MEDAN TIMUR**

I PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

NO. BELAKANG	URAIAN	KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DI LAKSANAKAN					KEGIATAN YANG BEDIANG DALAM PROSES PENTELESEMAN (SUDAH PENGALAMAN SPM)					KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DI LAKSANAKAN					
		OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	BISA (Rp.)	OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	SISA (Rp.)	OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	ALASAN TIDAKPAT DI LAKSANAKAN	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BEKAS BAHAN BANGUNAN Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	31	86.350.000	81.500.000	100	24.850.000	29	1	100	24.850.000	20	-	-	-	-	-	-
	BEKAS KATIBAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	1	15.200.000	3.120.000	100	12.080.000	79	1	100	12.080.000	79	-	-	-	-	-	-
	BEKAS KATIBAHAN UNTUK KEGIATAN KEMERINAN Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	3	7.000.000	5.785.000	100	1.215.000	17	2	100	5.785.000	17	-	-	-	-	-	-
	BEKAS KEDOK Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	1	162.340.000	71.250.000	100	91.110.000	56	3	100	99.350.000	11	10.960.000	-	-	-	-	-
	BEKAS KESERVISAN PROSES KEGIATAN BARAN & PRASARANA Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	3	25.000.000	23.950.000	100	1.050.000	4	5	100	23.950.000	4	1.050.000	-	-	-	-	-
	BEKAS PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENYALURAN KEMUNDAHAN DALAM BELAKANG TAHUN 2021 Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	17	22.000.000	8.180.000	100	13.820.000	63	2	100	16.745.000	68	35.255.000	-	-	-	-	-
	BEKAS KEMERINAN Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	2	4.000.000	4.000.000	100	0	0	2	100	4.000.000	0	0	-	-	-	-	-
	BEKAS KEMERINAN DAN MASYARAKAT Jalan Pembangunan, Gg. Sempurna	3	15.000.000	11.342.000	100	3.658.000	24	2	100	11.342.000	24	3.658.000	-	-	-	-	-
	JUMLAH		308.890.000	198.107.000	-	147.760.000	-	-	-	303.850.000	-	89.288.000	-	-	-	-	-

Mengantar
Lurah Sempurna

TEGUK SUJATNO, ST, M. Kom
NIP. 19780412519811027

Tanggal, 3 Januari 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

RINALDIOLAH PANE
NIP. 19751122 198503 1 001

**PENGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

NO.	KELURAHAN	URAIAN	KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN										KEGIATAN YANG SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN (SUDAH PENGALUAN SPM)										KEGIATAN YA	
			OUTPUT		ANGGARAN		REALISASI		SISA		OUTPUT		ANGGARAN		REALISASI		SISA		OUTPUT	ANGG				
			VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)				
1	2	Helvetia Timur	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		Beasiswa Beasiswa Lainnya	15	Orang	30.000.000	23.432.000	100	6.568.000	21,89	15	Orang	30.000.000	23.432.000	100	6.568.000	21,89	-	-	-					
		2 Pelatihan Sorotan	30	Orang	60.000.000	54.870.000	100	5.130.000	8,55	30	Orang	60.000.000	54.870.000	100	5.130.000	8,55	-	-	-					
		Beasiswa Cendekians	15	Orang	15.300.000	12.654.000	100	2.646.000	17,29	15	Orang	15.300.000	12.654.000	100	2.646.000	17,29	-	-	-					
		1 Pelatihan Sorotan	30	Orang	15.300.000	13.566.000	100	1.734.000	11,33	30	Orang	15.300.000	13.566.000	100	1.734.000	11,33	-	-	-					
		2 Pelatihan Vokasi																						
		Beasiswa ATK, Jasa Iklan, Reklame, Baye																						
		Publitas dan Dokumentasi	4	Kegiatan	40.000.000	35.777.000	100	4.223.000	10,56	4	Kegiatan	40.000.000	35.777.000	100	4.223.000	10,56	-	-	-					
		ATK Kegiatan	5	Kegiatan	17.400.000	17.400.000	100	0	-	5	Kegiatan	17.400.000	17.400.000	100	0	-	-	-	-					
		Honor Pokmas																						
		Makan dan Minum																						
		Reoran dan Minum Kegiatan	7	Kegiatan	30.000.000	22.000.000	100	8.000.000	26,67	7	Kegiatan	30.000.000	22.000.000	100	8.000.000	26,67	-	-	-					
		Pemberdayaan																						
		JUMLAH			208.000.000	179.698.000	-	28.301.000	-	-	-	208.000.000	179.698.000	-	28.301.000	-	-	-	-					

Mengetahui
Lurah Sasaku KPA

TEGUH SUJATMIKO, ST, M.Kom
NIP. 19780424 201001 1 027

Tanggal, 3 Ja
Bendahara Pengol

RINALDI OLOAI
NIP. 19751122 198

LAPORAN
 PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGLIMAN BARANG DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KEURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
 KECAMATAN MEDAN TIMUR

L PEMBANGUNAN BARANG DAN PRASARANA

NO. URUTAN	URAIAN	KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN				KEGIATAN YANG SEDANG DALAM PROSES PERYESEMAN (SUDAH PELOJUAN SPH)				KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANA							
		OUTPUT VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	OUTPUT VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	OUTPUT VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)				
1	PERINTIS	4	0	7	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	84	135.320.000	51.474.419	100	83.845.562	62	1	135.320.000	51.474.419	100	83.845.562	62	-	-	-	-
	2. JAMU, HORTIKULTUR, GEMARU	118	98.704.000	45.757.522	100	59.948.478	54	1	98.704.000	45.757.522	100	59.948.478	54	-	-	-	-
	3. BELANJA KEBUDAYAAN, KEGIATAN DAN PELATIHAN	1	12.800.000	1.818.500	100	10.980.500	86	1	12.800.000	1.818.500	100	10.980.500	86	-	-	-	-
	4. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	1	18.800.000	4.571.363	100	8.278.837	65	1	18.800.000	4.571.363	100	8.278.837	65	-	-	-	-
	5. BELANJA KEBUDAYAAN, KEGIATAN DAN PELATIHAN	1	8.000.000	4.987.450	100	12.600	0	1	8.000.000	4.987.450	100	12.600	0	-	-	-	-
	6. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	1	150.200.000	68.851.869	100	69.868.031	57	2	150.200.000	68.851.869	100	69.868.031	57	-	-	-	-
	7. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	1	124.100.000	106.870.124	100	31.289.858	24	1	124.100.000	106.870.124	100	31.289.858	24	-	-	-	-
	8. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	2	10.000.000	9.000.000	100	1.000.000	10	2	10.000.000	9.000.000	100	1.000.000	10	-	-	-	-
	9. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	12	31.100.000	2.170.000	100	14.340.000	67	3	31.100.000	2.170.000	100	14.340.000	67	-	-	-	-
	10. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	2	1.350.000	1.350.000	100	0	0	2	1.350.000	1.350.000	100	0	0	-	-	-	-
	11. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	2	12.000.000	11.717.000	100	288.000	2	2	12.000.000	11.717.000	100	288.000	2	-	-	-	-
	12. BELANJA BARANG DAN PRASARANA	2	869.994.000	310.094.314	-	292.848.068	-	-	869.994.000	310.094.314	-	292.848.068	-	-	-	-	-
	JUMLAH																
									492.654.780	288.543.303		204.411.477					

Mengantar
 Lurah Sempu KPA

Tanggal: 3 Januari 2022
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

RINALDI OLOAN PANE
 NIP. 19751122 199503 1 001

TEGUK SUATYAKO, ST, M. Kom
 NIP. 19750424 201001 1 007

**FENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEJATI LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN SARAWAK DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KEMUNYAHAN MAMUJUH ANJUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

IMBUDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN	URAIAN	KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN				KEGIATAN YANG SEDANG DALAM PROSES PEJALEMAN (BUMAH PENGALUAN SPM)				KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN									
		OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)	SISA (Rp.)	OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)	SISA (Rp.)	OUTPUT VOLUME SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)	SISA (Rp.)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Harau	Bantuan Binaan Lantara	30	50.000.000	48.308.342	100	1.413.353	2,83	0,02	30	50.000.000	48.596.946	100	1.413.054	2,83	-	-	-	-	-
	1. Pelebaran Binaan Coffee	60	20.000.000	19.999.650	100	3.350	0,02	0,02	60	20.000.000	19.999.650	100	3.350	0,02	-	-	-	-	-
	2. Pelebaran Binaan Industri	50	20.000.000	19.999.675	100	3.325	0,03	0,03	50	20.000.000	19.999.675	100	3.325	0,03	-	-	-	-	-
	3. Pelebaran Binaan Food	50	20.000.000	19.999.675	100	3.325	0,03	0,03	50	20.000.000	19.999.675	100	3.325	0,03	-	-	-	-	-
	Bantuan Cendekians																		
	1. Pelebaran Binaan Coffee	30	15.000.000	13.197.800	100	1.802.200	12,54	0,02	30	15.000.000	13.197.800	100	1.802.200	12,54	-	-	-	-	-
	2. Pelebaran Binaan Industri	60	15.000.000	14.984.001	100	105.999	0,70	0,02	60	15.000.000	14.984.001	100	105.999	0,70	-	-	-	-	-
	3. Pelebaran Binaan Food	50	15.000.000	14.981.700	100	138.300	0,92	0,02	50	15.000.000	14.981.700	100	138.300	0,92	-	-	-	-	-
	Bantuan ATK, Jasa Bina/Prasarana, Biaya Peralatan dan Konstruksi																		
	ATK Kegiatan	3	43.457.500	33.975.076	100	9.482.424	21,82	0,02	3	43.457.500	33.975.076	100	9.482.424	21,82	-	-	-	-	-
	Honor Narasumber dan Moderator	3	17.600.000	7.500.000	100	5.100.000	40,43	0,02	3	17.600.000	7.500.000	100	5.100.000	40,43	-	-	-	-	-
	Honor Pakar	3	13.500.000	13.500.000	100	0	0	0,02	3	13.500.000	13.500.000	100	0	0,02	-	-	-	-	-
	Makan dan Minum Kegiatan	3	21.600.000	21.572.000	100	28.000	0,13	0,02	3	21.600.000	21.572.000	100	28.000	0,13	-	-	-	-	-
	Honorarium Pengembangandan Pengisian Kuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa	12	27.760.000	27.760.000	100	0	0	0,02	12	27.760.000	27.760.000	100	0	0,02	-	-	-	-	-
	JUMLAH		246.207.500	226.038.990	100	18.189.450	7,39	0,02		246.207.500	226.038.990	100	18.189.450	7,39	0	0	0	0	0

Mengarahkan
Lurah Sarawak RPA

Tanggal: 3 Januari 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu

RINALDI OLIAN PANE
NP 1919112 199003 1 001

LAPORAN REALISASI DANA KELURAHAN 2023

EMBAKUMAY SAGAMA DAN PRASARANA

KELURAHAN	KODE REKENING	URAIAN	OUTPUT		TW		TW II		SISA		OUTPUT		ANGGARAN (Rp)					
			VOLUME	SATUAN	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	VOLUME	SATUAN						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembina Kegiatan Keagamaan																
Harau Timur		1. Renovasi Gedung Dhuwasa : Jl. Perok Sembok No. 10.VI																
		Upah Tenaga Kerja																
		4. Pemeliharaan Jalan Perumahan (Upah Tenaga Kerja)																
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor- di-Bila Kantor																
		1. Kebutuhan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor	1		2.345.457	2.335.496	99,53%											
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor- di-Bila Kantor	1		837.000	836.662	99,96%											
		1. Kebutuhan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor	1		837.000	836.662	99,96%											
	5.1.02.01.01.0038	Belanja barang untuk outfit diberikan kegiatan	1		59.227.705	59.100.780	99,80%											
		1. Kebutuhan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor	1		59.227.705	59.100.780	99,80%											
	5.1.02.01.01.0042	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70	kokak	3.840.000	3.840.000	100,00%											
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan kegiatan	72	kokak	3.744.000													
	5.1.02.06.02.0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat																
		1. Jasa Penyelenggaraan Simulasi (Tim Pengacaraan)	2	kegiatan	1.950.000													
		2. Honorarium Tim Penyelenggara Simulasi (Tim Panitia)	2	kegiatan	1.950.000													
		3. Honorarium Penyelenggara Simulasi (Tim Pengabdian)	2	kegiatan	1.950.000													
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Tim Panitia)	3	Jam	2.700.000													
		Jumlah			78.340.197	85.972.838	84,21	0	0	0	0	0	78.340.197	85.972.838	84,21	0	0	0
		Jumlah			78.340.197	85.972.838	84,21	0	0	0	0	0	78.340.197	85.972.838	84,21	0	0	0

78.450.339 82,48



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/07/07/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di Medan

Medan, 07/07/2023

Dengan hormat.
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDAH WIDIA FITRI
 NPM : 2005170207
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah** : Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas instansi kinerja pemerintah dan bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Rencana Judul** :
1. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah
 2. Pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten
 3. Analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah dan dampaknya terhadap belanja pemerintah

Objek/Lokasi Penelitian : MEDAN DENAI

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 Pemohon

(INDAH WIDIA FITRI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/07/07/2023

Nama Mahasiswa : INDAH WIDIA FITRI
 NPM : 2005170207
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Tanggal Pengajuan Judul : 07/07/2023
 Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (16 Oktober 2023)

Judul Disetujui**)

" Analisis Realisasi Anggaran untuk
 menilai efektivitas dan Efisiensi
 Kinerja Pemerintahan di Kelurahan
 Helvira Timur "

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, Desember 23

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 13 Desember 2023



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : I N D A H W I D I A F I T R I

NPM : 2 0 0 5 1 7 0 2 0 7

Tempat/Tgl Lahir : S U K A J A D I 9 - J A N U A R I
2 0 0 2

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : A L F A L A H S

Tempat Penelitian: K A N T O R B A D A N R I S E T D A U
I N O V A S I D A E L A H

Alamat Penelitian : J L J E N D E R A L B E S A R A H
N A S U T I O N N O 3 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

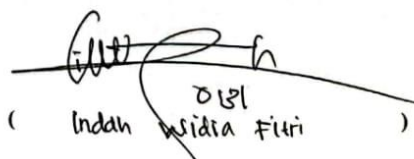
1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(R I V A U B A R H A R A H A P S . E . M S i . A K . C A . C P A)


(I n d a h W i d i a F i t r i)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3563/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Indah Widia Fitri
 N P M : 2005170207
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.SI., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 20 Desember 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 07 Jumadil Akhir 1445 H
 20 Desember 2023 M

Dekan

Dr. H. Juhuri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000.9/2899

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3563/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal Izin Prariset Pendahuluan.
NAMA	: Indah Widia Fitri
NPM	: 2005170207
JURUSAN	: Akuntansi
LOKASI	: Kelurahan Helvetia Timur Kota Medan.
JUDUL	: "Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur."
LAMANYA	: 1 (Satu) Bulan.
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Melakukan Pra Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 22 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Helvetia Kota Medan.
3. Lurah Helvetia Timur Kota medan.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN HELVETIA
KELURAHAN HELVETIA TIMUR**

Jalan Setia Budi No 1, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20124
Pos-el @gmail.com

Medan, 02 Februari 2024

Nomor : 400.10.6.3/20
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberian Izin Riset Pendahuluan

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3563/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 20 Desember 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan

Berkenan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset di Kelurahan Helvetia Timur untuk penyusunan skripsi. Adapun nama mahasiswa tersebut yang melakukan riset adalah :

Nama : Indah Widia Fitri
Npm : 2005170207
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan di Kelurahan Helvetia Timur.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lurah Helvetia Timur,
Rachmad Affinsyah Pohan, S.H.
Penata Tk. 1 (III/d)
198304112009031006

**# KOLABORASI
MEDAN BERKAH**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : INDAH WIDIA FITRI
NPM : 2005170207
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Identifikasi masalah penelitian lagi tabel 1.1, di cek lagi. apakah benar	19/1/24	2/
Bab2	- font tulisan penelitian lagi gambar Times new roman, font ditambah lagi, kerangka penulisan, telunjuk pengumpulan data	19/1/24	2/
Bab3	penulisan	19/1/24	2/
Daftar Pustaka	gambar mendeleng. situs dosen dan umma	19/1/24	2/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Buat daftar pertanyaan	19/1/24	2/
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Medan, 1 - 2 - 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., AK., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : INDAH WIDIA FITRI
NPM : 2005170207
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI
KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	—		
Bab2	perbaiki penomoran halaman	30/1/24	SA
Bab3	daftar wawancara yang yg tidak perlu -	28/1/24	SA
Daftar Pustaka	Sitasi dosen di UMSU minimal 5	30/1/24	SA
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Buat PPT, dan daftar pustaka	30/1/24	SA
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 1 - 2 - 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Msi., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

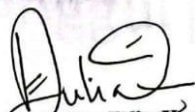
Nama Mahasiswa : INDAH WIDIA FITRI
NPM : 2005170207
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.SI., AK.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	—		
Bab2	—		
Bab3	—		
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Daph wawancara publikasi	1/2 24	3/1
Persetujuan Seminar Proposal	ACC proposal lengkap dan semua proposal	1/2 24	3/1

Medan, 1-2-2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.SI)


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 22 Februari 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Indah Widia Fitri*
NPM. : 2005170207
Tempat / Tgl.Lahir : *Suka Jadi, 09 Januari 2002*
Alamat Rumah : *Jl. Al-falah V no. 14*
Judul Proposal : *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Helvetia Timur*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Letak belakang masalah, fenomena, latar belakang masalah, identifikasi masalah.</i>
Bab II	<i>Teori di belakang kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>waktu penelitian, teknik, pengumpulan data</i>
Lainnya	<i> Sistematis penulisan buku pedoman</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Februari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemfimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pemfanding

Elizar Sinambela, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 22 Februari 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Indah Widia Fitri
NPM : 2005170207
Tempat / Tgl.Lahir : Suka Jadi, 09 Januari 2002
Alamat Rumah : Jl. Al-falah V no. 14
Judul Proposal : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Helvetia Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA*

Medan, 22 Februari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Iki. Zulia Hanum, SE., M.Si

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 1171/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 27 Syawal 1445 H
06 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kelurahan Helvetia Timur
Jln. Setia Budi No.01, Helvetia Tim., Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Indah Widia Fitri
N P M : 2005170207
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Helvetia Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN HELVETIA
KELURAHAN HELVETIA TIMUR**

Jalan Setia Budi No 1, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20124
Pos-el kelurahanhelvetiatimur@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.10.2.2/1071**

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3563/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 20 Desember 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan

Dengan ini Saya Lurah Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia menerangkan bahwa Mahasiswi yang bernama :

Nama : Indah Widia Fitri
Npm : 2005170207
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan di Kelurahan Helvetia Timur.

Memang benar telah melaksanakan riset di Kantor Lurah Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia mulai dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 06 Mei 2024.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Mei 2024

Lurah Helvetia Timur



Athiah Ramadhani Siregar, S.STP, M.Si

Penata FK/1 (III/d)

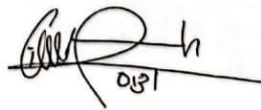
19850601 200312 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

1. Nama : Indah Widia Fitri
NPM : 2005170207
Tempat Tanggal lahir : Suka Jadi, 09 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Suka Jadi, Bangun Purba Timur Jaya
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : indahwidyafitri08@gmail.com
HP : 081536391772
2. Nama orang tua
Ayah : Uwit Niti Sumitro
Ibu : Nur Puadi
3. Jenjang Pendidikan
- SD Negeri 005 Bangun Purba
 - MTs S Ash-Shohibiyah Bangun Purba
 - SMAS Muhammadiyah Rambah
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 sampai sekarang

Medan, Mei 2024

Hormat Saya



Indah widia Fitri